

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nadya Septiana

NPP. 29.1190

*Asdaf Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: Nadya.septiana88@gmail.com

## **ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** Many micro-businesses have been affected by the Covid-19 pandemic. Economic Recovery Efforts for Micro Businesses affected by the Covid-19 Pandemic, one of which is the Assistance for Micro Business Productive (BPUM) program which is a capital assistance for micro-businesses affected by Covid-19 with assistance of 2.4 Million by the Government through the Ministry of Cooperatives and Micro Enterprises of the Republic of Indonesia. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the Micro Business Productive Assistance policy, its supporting and inhibitory factors and the efforts made to overcome obstacles in the implementation of Micro Business Productive Assistance from the impact of the pandemic in Banjar Regency. **Method:** With the research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. The instruments used in this study are the researchers themselves with the help of tools to collect data. The data sources in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques include interviews, observations and documentation. As well as the data analysis technique used is to select data with SWOT data analysis techniques (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). **Result:** The results of this study show that: (1) Communication has been implemented even though much has still not been done massively; (2) Resources have been implemented well even though there are still shortcomings; (3) Disposition has been implemented even though the employee's response is less than optimal; (4) Bureaucratic Structure has been implemented in accordance with standard operating procedures (SOP) applicable to BPUM. **Conclusion:** Many supporters came but many also hampered one of them was in communication, and some of the efforts made by the Banjar Regency Government to deal with the obstacles went well, such as maximizing the implementation of Policies formulated in the Technique of analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats.

**Keywords:** BPUM, micro-enterprises, Society, UMKM

## **ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Banyak pelaku usaha mikro yang terdampak akibat pandemi covid-19. Upaya Pemulihan Ekonomi Bagi Usaha Mikro yang terdampak Pandemi Covid-19 salah satunya yaitu program Bantuan bagi Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak covid-19 dengan bantuan sebesar 2.4 Juta oleh Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro RI. **Tujuan:** Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro, faktor pendukung dan penghambatnya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penghambat

dalam implementasi Bantuan Produktif Usaha Mikro dari dampak pandemi di Kabupaten Banjar. **Metode:** Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri dengan bantuan alat untuk mengumpulkan data. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknik analisa data yang digunakan adalah menyeleksi data dengan Teknik analisis data SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi sudah terimplementasi meskipun banyak yang masih belum dilakukan secara masif ; (2) Sumber daya sudah terimplementasi dengan baik meski masih ada kekurangan; (3) Disposisi sudah terimplementasi meskipun respons pegawai kurang maksimal; (4) Struktur Birokrasi sudah terimplementasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk BPUM. **Kesimpulan:** Banyak pendukung yang berdatangan namun banyak juga penghambat salah satunya adalah di komunikasi, dan beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menghadapi penghambat berjalan dengan baik, seperti memaksimalkan implementasi Kebijakan yang dirumuskan dalam Teknik analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan beserta ancamannya. **Kata kunci:** BPUM, Usaha Mikro, Masyarakat, UMKM

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Wabah pandemi Covid-19 yang dikalanya ini menyerang dunia menimbulkan krisis ekonomi global, yang berawal menginfeksi orang pertamanya di Kota Wuhan serta setelah itu menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia ). Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi permasalahan Covid-19 ini bertepatan pada 2 Maret 2020 walaupun timbul sebagian berpendapat kalau Covid-19 sudah masuk ke Indonesia lebih dahulu sebelum itu. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya untuk menekan laju kenaikan Covid-19 serta berupaya untuk mengatasi akibat yang mencuat di bidang ekonomi. Terdapat tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis dikalanya memeringati Hari Pajak tahun 2020, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS kuartal satu tahun 2020 yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal satu tahun 2019 ke 2,84 persen pada kuartal satu tahun 2020. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Keputusan pemerintah menerapkan karantina wilayah dalam hal ini PSBB dan PPKM berdampak luas pada UMKM dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, pendapatan masyarakat serta kesejahteraan hidup masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia menjadi sebuah tulang punggung sistem perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada kuartal satu tahun 2021, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Pemerintah terus memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah karena usaha mikro, kecil dan menengah merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Masalah ekonomi di Indonesia selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan masyarakat. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah sangat menggembirakan bagi pelaku usaha, yang menyebutkan salah satu bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. Era pandemi Covid-19 seperti saat ini pelaku usaha tidak dapat menjalankan bisnisnya seperti umumnya, dan terpaksa terhenti dengan diberlakukannya Undang-Undang No.06 Tahun 2018 tentang karantina wilayah maka banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup usahanya dan mengalami kebangkrutan. Penurunan aktivitas perekonomian akibat pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap pekerja di Indonesia dan telah mengakibatkan kesulitan ekonomi (economic hardship) bagi sebagian besar rumah tangga. Tidak terkecuali di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Saat ini memang hampir semua Usaha mikro di Kabupaten Banjar rata-rata dalam keadaan menurun, dalam situs Bappeda Litbang Kabupaten Banjar sektor Usaha mikro dari segi pendapatan mengalami penurunan sebesar 41,6%, namun belum semua usaha mikro yang melaporkan diri, sehingga banyak daerah yang dananya belum dicairkan seperti yang telah terjadi pada pencairan tahap pertama pada 2020. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar, mengungkapkan bahwa pihak dinas telah mengusulkan ke pemerintah pusat. Dari program kebijakan yang tengah berjalan tidak hanya persoalan dana yang belum turun kepada pemilik Usaha mikro, pada kenyataan yang terjadi dilapangan kebijakan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini tidak lepas dari adanya kebijakan Refocusing yang membuat dana anggaran menjadi terbatas dan terpaksa dana dipotong 50% pada tahap tiga dan empat sehingga dana yang dikeluarkan tidak sama dengan pada awal program kebijakan ini dijalankan..

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Pada Penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis kaji sebagai bahan referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memiliki tema yang sama dengan yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Rozzaq, Agus Widiyarta pada tahun 2021 yang berjudul Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk Menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan komunikasi, penyediaan sumberdaya, pendisposisian, dan struktur birokrasi dengan baik. Penelitian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Karla Meiva Lumempow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman pada tahun 2021, dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk Menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Kawangkoan, penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Pelaksanaan program bantuan sudah berjalan baik namun kurang melibatkan pemerintah Desa dan Kecamatan. Penelitian ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eva Syarifah, S. Prnamasari, Agus Purnomo pada tahun 2021, dengan judul Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Umkm (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Desa Melayu). Adapun tujuan dari penelitian tersebut Mengetahui bagaimana mekanisme dan efektivitas penyaluran

dana BPUM. penelitian ini dilakukan dengan teori Miles dan Huberman. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Mekanisme BPUM dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencairan dan pengawasan sedangkan efektivitasnya diketahui bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM cukup efektif. Penelitian keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Reny Wardiningsih, Baiq Yuni Wahyuningsih, Riris Sugianto pada tahun 2021, tujuan dari penelitian ini untuk Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaku Umkm Penerima Bpum Sebagai Dampak Covid-19 Di Desa Jenggik Kecamatan Terara. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Masyarakat dapat mengetahui perkembangan usahanya melalui pembukuan yang baik dan sistematis. Penelitian kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eva Auliya Putri, Slamet Muchsin, Hayat, pada tahun 2021. Dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu). Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah mendeskripsikan evaluasi program bansos yang dilaksanakan di Desa Kersik Putih. Penelitian ini menggunakan teori indikator evaluasi CIPP dengan nama evaluasi formatif yang dikemukakan oleh Endang Multiyaningsih. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan Diketahui aloksi anggaran on budget, terdapat 66 penerima bantuan, dan perekonomian penerima sudah mulai membaik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, sama dengan beberapa penelitian di atas penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana dua penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi kebijakan BPUM peneliti menganalisis bagaimana kebijakan BPUM ini dijalankan serta apa faktor pendukung dan penghambat di masing-masing lokasi penelitian. Dalam mengimplementasikan kebijakan BPUM ini perlu diketahui apakah kebijakan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan para pelaku usaha mikro dengan adanya kebijakan ini. Sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, selain dari pelaksanaannya juga diperlukan upaya atau alternatif yang tepat dalam mengoptimalkan program kebijakan BPUM ini, maka dari itu penelitian ini peneliti juga mengkaji upaya apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan implementasi BPUM.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta mendeskripsikan strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kabupaten Banjar.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari kepala dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten banjar, kepala bidang pemberdayaan usaha mikro kabupaten banjar, kepala seksi fasilitas usaha mikro kabupaten banjar, bank penyalur bpum, tokoh relawan masyarakat, dan 10 pelaku usaha mikro. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Yadav R (Yadav, 1980) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat

terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data yang pertama kali dilakukan kepada responden adalah wawancara secara langsung untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan usaha produktif mikro. Pengambilan data melalui wawancara ini dilakukan terhadap 15 responden. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### 3.1. Data Hasil Analisis SWOT

Pengambilan data kedua dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Kepada 15 responden diberikan angket untuk mengetahui kondisi tiap-tiap indikator strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Hasil dari ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan angket tersebut, kemudian diperoleh nilai dari tiap-tiap indikator strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Dari nilai-nilai tersebut, diperoleh total nilai yang dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**

**Tabel 1 Strength (Kekuatan)**

	K1	K2	K3	K1-K5
<b>Total</b>	66	68	65	199

**Tabel 1 Weakness (Kelemahan)**

	K1	K2	K3	K1-K5
<b>Total</b>	52	43	54	149

**Tabel 3 Opportunity (Peluang)**

	P1	P2	P3	P1-P2
<b>Total</b>	63	71	63	197

**Tabel 4 Threat (Ancaman)**

	T1	T2	T3	T1-T2
<b>Total</b>	45	47	38	130

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Setelah diketahui total nilai kondisi dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman), selanjutnya dilakukan perhitungan nilai bobot dan ranting Matriks IFE dan EFE. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perhitungan nilai bobot dan ranting Matriks IFE dan EFE. Kategori sebagai berikut;

**Tabel 5**

Faktor Internal Analisis Summary (IFE)

NO	FAKTOR STRATEGI INTERNAL (KEKUATAN)	JUMLAH	BOBOT	RATING	SKOR = BOBOT X RATING

1	Kesigapan Pemerintah Kabupaten	66	0.19	4.4	0.84
2	Pelayanan yang baik	68	0.2	4.53	0.91
3	Informasi penyaluran mudah di dapat	65	0.19	4.33	0.82
TOTAL		199	0.57		2.56

Lanjutan faktor Internal Analisis Summary (IFE);

**Tabel 6**

Internal Analisis Summary (IFE)

NO	FAKTOR STRATEGI INTERNAL (KELEMAHAN)	JUMLAH	BOBOT	RATING	SKOR = BOBOT X RATING
1	Jauh jarak wilayah penyaluran	52	0.15	3.47	0.52
2	Kekurangan SDM	43	0.12	2.87	0.34
3	Keterbatasan media elektronik	54	0.16	3.6	0.58
TOTAL		149	0.43		1.44
Total Kekuatan dan Kelemahan		348	1,00		4

Selanjutnya berikut adalah kategori Faktor Eksternal Analisis Summary (EFE);

**Tabel 7**

Faktor Eksternal Analisis Summary (EFE)

NO	FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (PELUANG)	JUMLAH	BOBOT	RATING	SKOR = BOBOT X RATING
----	-------------------------------------	--------	-------	--------	-----------------------

1	Membantu perekonomian pelaku usaha mikro yang terdampak paandemi	63	0.19	4.2	0.8
2	Partisipasi tinggi dari pelaku usaha mikro	71	0.22	4.7	1.03
3	Mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan perekonomian nasional	63	0.19	4.2	0.81
TOTAL		197	0.59		2.64

Selanjutnya berikut adalah kategori Eksternal Analisis Summary (EFE);

**Tabel 8**

Lanjutan faktor Eksternal Analisis Summary (EFE)

NO	FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (ANCAMAN)	JUMLAH	BOBOT	RATING	SKOR = BOBOT X RATING
1	Kesalahan dalam data penerima BPUM	45	0.14	3	0.41
2	Pelayanan SDM tidak maksimal	47	0.14	3.1	0.45
3	Munculnya oknum calon dalam proses pendaftaran dan penyaluran BPUM	38	0.12	2.5	0.29

TOTAL	130	0.41		1.15
Total Peluang dan Ancaman	327	1,00		3.79

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai total skor internal sebanyak 4.00 yang terdiri dari Faktor Kekuatan (*Strenght*) sebanyak 2,56 dan Faktor Kelemahan (*Weakness*) sebanyak 1,44. Sedangkan nilai total skor eksternal sebanyak 3,79 yang terdiri dari Faktor Peluang (*Opportunity*) sebanyak 2,65 dan Faktor Ancaman (*Threat*) sebanyak 1,15.

Menurut (Yusuf et al. 2563, 28), penggabungan dari kedua matriks IFE dan EFE akan menghasilkan sebuah matriks yaitu matriks Internal-Eksternal (matriks IE), yang digunakan untuk menganalisis posisi kebijakan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk diterapkan. Berdasarkan total skor IFE yaitu 4.00, dan total skor EFE yaitu 3.79, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan BPUM berada pada posisi yang kuat sehingga dikelompokkan sebagai Growth Strategy, yaitu strategi yang didesain untuk pertumbuhan sendiri.

### 3.2. Implementasi Kebijakan

Penulis melakukan pengukuran terhadap Implementasi dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro. Penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro disebutkan dalam Permenkukm Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas permenkukm nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro yang mana target sasaran dari bantuan ini adalah kepada Pelaku Usaha Mikro. Berdasarkan pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George C. Edward III 1980), sebuah model implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward III (1990), berikut empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Komunikasi yang memperlihatkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar sudah sering melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi sekedar untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perkembangan dari program bantuan BPUM, Dari semua hasil wawancara di atas diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antara pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar dengan para Pelaku Usaha Mikro terjalin dengan cukup baik walaupun tetap saja tidak semua dari para pelaku usaha mendapatkan informasi tapi pihak kedinasan tetap mengupayakan semaksimal mungkin agar informasi terkait dengan BPUM ini dapat mencakup kesemua kalangan pelaku usaha mikro
- b. Sumber daya yang ternyata masih harus dilakukan penambahan khususnya dibagian pelayanan, Dalam segi sumber daya, terdapat beberapa sumber daya dalam implementasi bisnis ini. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang ada dibalik pemerintahan, baik yang termasuk dalam struktur organisasi maupun relawan yang datang membantu. Sumber daya anggaran berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Sumber daya peralatan berupa komputer dan website untuk pendataan calon penerima bantuan. Sedangkan sumber daya kewenangan merupakan tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini yang ada dalam struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Disposisi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar adalah dengan memberikan peraturan berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terealisasinya kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Permenkukm Nomor 2 Tahun 2021. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, berupa urusan administrasi dan disposisi persuratan, juga sikap dari pengaplikasian kebijakan bantuan tersebut terkhusus di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar

d. Struktur birokrasi dimulai dari para pelaku usaha kemudian ke seksi yang dituju lalu akan didisposisikan ke kepala bidang terkait untuk nantinya direalisasikan. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana kinerja atau hubungan dari setiap bidang/bagian yang ada di dalam kedinasan terkhususnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar. Untuk struktur birokrasi yang diteliti yaitu mengerucut kepada bidang pengembangan usaha mikro mulai dari proses pendataan sampai pengimplementasian kebijakan bantuan kepada pelaku usaha mikro.

### **3.3. Faktor pendukung dan faktor penghambat**

Faktor pendukung adalah alat penunjang yang mencakup seperti sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan bantuan untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar terdapat beberapa faktor dalam terwujudnya implementasi bantuan tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan kesempatan untuk seluruh para pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19 untuk dapat mendaftarkan usahanya serta mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan oleh pemerintah pemerintah selaku menjadi fasilitator terhadap para pelaku usaha dan masyarakatnya, pemerintah pun berkerjasama dengan tokoh masyarakat seperti kepada desa dan kepala kelurahan terkait untuk menyampaikan informasi kepada para pelaku usaha dan masyarakatnya guna meratanya semua program yang dijalankan pemerintah, dan banyak hal dilakukan pemerintah yang menjadi factor pendukung berkembangnya usaha-usaha seperti halnya mengajari dan membimbing pembuatan proposal.

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Banjar mencakup beberapa faktor seperti komunikasi mungkin akan selalu menjadi hal yang menjadi permasalahan dan juga pendataan dari pihak kedinasan yang masih memakai cara lama padahal sekarang dapat era industry 4.0 yang notabenehnya hampir semua sudah tersentuh dengan media elektronik akan menghambat dan tidak terjangkau ke setiap pelosok daerah. Juga dari para pelaku usaha selalu saja keraguan menjadi akar permasalahan sehingga mereka tidak tau akan hal-hal seperti itu, dan sebenarnya tentang bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Usaha Mikro akan bergerak lambat apabila tidak ada bantuan pihak kedua terkhususnya pihak pemerintah, komunikasi menjadi hal yang sangat sering dikeluhkan dalam pengimplementasian setiap program kerja pemerintah ini juga sangat berdampak besar bagi perekonomian di daerah, yang menjadikan lambatnya proses berkembangnya perekonomian.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Program kebijakan BPUM memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan pelaku usaha mikro dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. BPUM di Kabupaten Banjar Penulis menemukan temuan penting melalui hasil Analisis SWOT, ada beberapa strategi yang dapat diupayakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Kabupaten Banjar, yaitu :

*Strategi Strength-Opportunity*, Kesiapan pemerintah dapat membantu perekonomian pelaku usaha mikro. Akibat wabah pandemic Covid-19, hampir sebagian besar usaha dari pelaku usaha mikro mengalami “kematian”. Namun melalui kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan dengan berbagai pelaksanaan program dan kerjasama dengan pihak lain seperti Kominfo dan Bappeda, diharapkan kebijakan bantuan ini pada akhirnya benar-benar membantu dan mencakup seluruh pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Banjar tanpa terkecuali. Pelayanan yang baik membuat partisipasi pelaku usaha mikro tinggi. Tim pendaftaran dilengkapi dengan APD

dan tetap berprinsip safety first akan meningkatkan pelayanan menjadi semakin baik dan akan membuat para pelaku usaha mikro tergerak untuk bersikap aktif dalam menyikapi kebijakan bantuan ini. Proses penyaluran bantuan yang lancar dapat mewujudkan ketahanan nasional. Apabila penyaluran bahkan dapat sampai ke tempat yang jaraknya jauh, ketahanan nasional akan semakin meningkat.

*Strategi Weakness-Opportunity*, Terkadang ada hal-hal seperti kondisi geografis dan sulitnya komunikasi membuat penyaluran bantuan jadi lebih sulit. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah akses masyarakat dalam penyaluran apabila pemerintah sendiri menemui kendala dalam menyalurkan. Masyarakat dapat dibiarkan dengan mengakses sendiri dan tentu saja dimudahkan dan dibantu jalannya dalam pengaksesan sendiri. Dengan berbagai program dan teknologi yang digunakan, mencukupi SDM pada kedinasan akan dapat membantu menangani dan mengelolah dengan baik partisipasi pelaku usaha yang tinggi. Keterbatasan dalam media elektronik dapat ditanggulangi salah satunya dengan upaya berkerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan penyedia alat dan perangkat elektronik. Sehingga upaya penyebaran melalui media elektronik dapat berdampak lebih besar dan tidak menjadi sia-sia.

*Strategi Strength-Threat*, Terjadinya kesalahan data tentu saja dapat terjadi dalam kondisi partisipasi yang tinggi. Namun data dapat diolah dengan baik melalui pengecekan ke sumber data yang akurat. Salah satu yang dapat diupayakan adalah penguatan regulasi dengan dinas pencatatan sipil agar kesalahan data penerima cepat diatasi. Pemutakhiran (upgrade) teknologi terus dilakukan agar lebih mudah menyebarkan informasi dan mengumpulkan data. Namun ada juga hal yang sama pentingnya dengan pemutakhiran teknologi yaitu SDM dibalik semua teknologi itu perlu juga dilatih agar pelayanan semakin jauh lebih maksimal. Munculnya calo karena kurangnya ketegasan aturan dan persyaratan selama proses implementasi kebijakan berlangsung. Perlu dilakukan pengawasan yang serius pada proses penyaluran secara menyeluruh agar tidak muncul pihak calo yang merugikan pelaku usaha mikro maupun pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat. Dan

*Strategi Weakness-Threat*, Pelatihan perangkat dan SDM yang bertujuan agar mereka bekerja dengan baik dalam sosialisasi masyarakat memang perlu. Namun, perlu juga diperhatikan kembali apa isi dan cara mensosialisasikan serta cara dan substansi sosialisasi harus jelas dan dekat dengan masyarakat. Penambahan SDM dalam pelayanan BPUM baik untuk pelayanan di kedinasan maupun yang turun secara langsung bertemu dengan masyarakat sangat perlu dipertimbangkan. Jumlah SDM yang cukup dapat dialokasikan untuk pembuatan tim internal di setiap kecamatan. Kendala dibagian media elektronik sudah diupayakan dengan berbagai kerjasama. Namun pada kenyataannya akan ada saja masyarakat yang masih sulit memiliki media elektronik. Sehingga, pihak yang berperan dalam penyebaran informasi tetap harus berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tidak memiliki media elektronik.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi pemuda dalam program kebijakan BPUM di Kabupaten Banjar telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan seluruh masyarakat. Pada bagian implementasi terlihat bahwa masih ada kekurangan sumberdaya, ditemukan pula faktor penghambat dan pendukung. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memaksimalkan implementasi Kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Kabupaten Banjar. Melalui analisis SWOT yang telah dilakukan melalui penelitian ini, diharapkan bahwa pemerintah dapat segera melakukan strategi atau upaya untuk memaksimalkan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan Bantuan Produktif Usaha Mikro di Kabupaten Banjar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banjar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdal. 2015. “KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik).” : 37,57. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>.
- Arsyad, Lincolin. 2015. “Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi.” *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan* 05(01): 1–37.
- George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980)
- Yusuf, M., Nurhamlin, Setiawan, Y., & Supeni, E. A. (2563). *Decision Support System*. In [www.sut.ac.th/ist/IT/DDS\\_Book.do](http://www.sut.ac.th/ist/IT/DDS_Book.do). Penerbit IPB Press. [www.sut.ac.th/ist/IT/DDS\\_Book.do](http://www.sut.ac.th/ist/IT/DDS_Book.do).
- Putri, Sherina Anjani, ‘Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi Solusi’, Universitas Indonesia: Jakarta, 2020
- Hayat, *Manajemen Kebijakan Publik*, Intrans Publishing (Malang: Intrans Publishing, 2017)
- Marzuki, Ismail, Erniati Bachtiar, Fitria Zuhriyatun, Agung Mahardika Venansius Purba, Hesti Kurniasih, Deasy Handayani Purba, and others, *COVID-19: Seribu Satu Wajah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Putri, Eva Auliya, and Slamet Muchsin, ‘EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK DI ERA PANDEMI COVID-19 ( Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Admiministrasi , Universitas Islam Malang , Jl . M’ , 15.7 (2021), 32–38
- Suaib, Muhamad Ridha, *Pengantar Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016)
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ed. by Dede Mariana and Caroline Paskarina (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi) Bandung, 2006)
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014)
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007)